

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan *value for money* maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari sisi rasio ekonomis, pada tahun 2020 dan 2021, rasio ekonomis berada pada kategori kurang ekonomis akibat tingginya realisasi belanja pegawai yang bersifat wajib, belanja operasional, serta adanya belanja tidak terduga dan belanja modal dalam rangka penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19. Tahun 2022 dan 2024 menunjukkan kondisi tidak ekonomis karena realisasi belanja melampaui anggaran, terutama dipicu oleh lonjakan belanja barang dan jasa serta belanja modal yang sangat signifikan. Sementara itu, tahun 2023 menjadi tahun dengan tingkat keekonomisan terbaik (cukup ekonomis), karena adanya pengendalian belanja pada belanja pegawai, bantuan keuangan, dan belanja lainnya, meskipun belanja modal tetap cukup tinggi.
2. Dari sisi rasio efisiensi, Kabupaten OKU belum mampu mencapai kondisi efisien secara optimal. Pada tahun 2020 dan 2022, rasio efisiensi menunjukkan kondisi tidak efisien karena realisasi belanja lebih besar dibandingkan pendapatan daerah. Tahun 2021, 2023, dan 2024 berada pada kategori kurang efisien, yang mencerminkan bahwa meskipun belanja relatif dapat dikendalikan, pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu menopang kebutuhan belanja secara memadai. Rendahnya realisasi PAD, terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah, menjadi faktor

utama penyebab rendahnya efisiensi. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerah.

3. Dari sisi rasio efektivitas, kinerja pendapatan Kabupaten OKU secara umum menunjukkan hasil yang baik hingga sangat baik. Pada tahun 2020 dan 2023, efektivitas pendapatan berada pada kategori efektif, sedangkan pada tahun 2021, 2022, dan 2024 berada pada kategori sangat efektif karena realisasi pendapatan berhasil melampaui target yang ditetapkan. Tingginya efektivitas ini terutama didorong oleh besarnya kontribusi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan transfer antar daerah, serta pendapatan lainnya yang melampaui target. Namun demikian, tingginya rasio efektivitas ini belum sepenuhnya mencerminkan kemandirian fiskal daerah karena masih didominasi oleh sumber pendapatan transfer, bukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dapat diberikan beberapa saran yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten OKU perlu memperkuat perencanaan anggaran agar lebih realistis dan berbasis kebutuhan prioritas.
2. Pemerintah Kabupaten OKU perlu mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi (upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber pajak dan retribusi yang sudah ada yaitu objek dan subjek pajak yang terdaftar) dan ekstensifikasi (upaya untuk memperluas basis pendapatan dengan mencari dan menetapkan sumber-sumber pajak

dan retribusi yang baru atau objek/subjek yang selama ini belum terjangkau).

3. Tingginya ketergantungan terhadap dana transfer menunjukkan rendahnya kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong inovasi pendapatan daerah, seperti pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang produktif dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
4. Pemerintah daerah perlu memperkuat fungsi pengawasan agar pelaksanaan anggaran tetap sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan yang efektif akan membantu mencegah pemborosan anggaran dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
5. Meskipun kinerja pendapatan daerah tergolong efektif bahkan sangat efektif, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa keberhasilan tersebut diiringi dengan peningkatan efisiensi dan keekonomisan belanja. Pencapaian target pendapatan tidak hanya bergantung pada dana transfer, tetapi juga diimbangi dengan pengelolaan belanja yang lebih hemat dan produktif.
6. Belanja modal yang tinggi hendaknya diarahkan pada kegiatan yang memiliki dampak ekonomi jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi lokal. Dengan demikian, belanja modal tidak hanya meningkatkan pengeluaran daerah, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).